



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018**



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/1030 /KEP/35.07.013/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/833/KEP/35.07.013/2017 TENTANG  
PENGESEHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/833/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2018, perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/833/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/833/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2018;

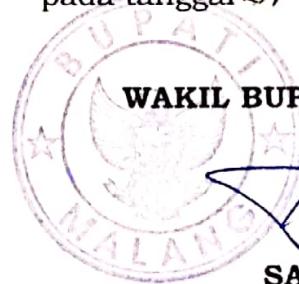
- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
  2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Desember 2018 Nomor: 050/8597/35.07.202/2018 tentang Draf Keputusan Bupati Malang tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2018;
  3. Berita Acara tanggal 29 Oktober 2018 Nomor: 050/7060/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2018;
  4. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Desember 2018 Nomor: 050/8633/35.07.202/2018;
  5. Surat Pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang tanggal 29 Oktober 2018 Nomor: 180/6173/35.07.105/2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/833/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2018, dalam Lampiran.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal *31 Desember* 2018



**WAKIL BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;  
2. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten  
Malang;  
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Kabupaten Malang.
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
MALANG NOMOR:  
188.45/833/KEP/35.07.013/2017 TENTANG  
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA  
KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2018

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018. Sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Perubahan Rencana Kerja memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018.

Dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  22. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
  23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
  24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
  25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
  26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
  27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/833/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2018;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan

untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang selama Tahun 2018.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan dengan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja;
2. Memperlancar tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Malang di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018**

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB IV PENUTUP**

**BAB III**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Tabel 3.1**

**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2		<b>Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>										
2	1	<b>Tenaga Kerja</b>										
2	1	1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>	-	<b>100%</b>		
2	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk Dan Surat Keluar	Dinas Tenaga Kerja	7500 Buah	13.170.000	APBD	-	7500 Buah	279.939.400
2	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/ Bersih, Telekomunikasi Dan Internet	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	24.000.000	APBD	-	12 Bulan	24.729.840
2	1	1	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	Dinas Tenaga Kerja	11 Orang	538.148.000	APBD	-	11 Orang	101.209.160
2	1	1	4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Servis Peralatan Kantor, Dan Pengadaan Suku Cadang Yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	49 Unit	19.900.000	APBD	-	49 Unit	20.024.301
2	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	15 Jenis	146.498.000	APBD	-	15 Jenis	53.025.471

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	1	1	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-Alat Listrik Dan Elektronik	Dinas Tenaga Kerja	68 Jenis	5.100.000	APBD	-	68 Jenis	3.343.108
2	1	1	7	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	9 Unit	31.500.000	APBD	-	9 Unit	120.786.950
2	1	1	8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	36 Jenis	96.000.000	APBD	-	36 Jenis	108.536.520
2	1	1	9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Luar Daerah	Dinas Tenaga Kerja	94 HOK	220.975.000	APBD	-	94 Hok	100.379.108
2	1	1	10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah	Dinas Tenaga Kerja	394 HOK	134.855.000	APBD	-	394 Hok	130.083.538
2	1	1	11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	36 Jenis	71.620.000	APBD	-	36 Jenis	47.135.762
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>	-	<b>100%</b>	
2	1	2	1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/ Berkala	Dinas Tenaga Kerja	1 Jenis	73.306.000	APBD	-	1 Jenis	30.463.499
2	1	2	2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat Dan Kendaraan Roda Dua Yang Dipelihara Rutin Dan Berkala	Dinas Tenaga Kerja	8 Unit	19.240.000	APBD	-	8 Unit	20.882.976
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai Di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>	-	<b>100%</b>	
2	1	3	1	Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Yang	Dinas Tenaga	3 Orang	4.000.000	APBD	-	3 Orang	3.434.700

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Formal	Mengikuti Pelatihan	Kerja						
2	1	4		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>	-	<b>100%</b>	
2	1	4	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP	Dinas Tenaga Kerja	1 Buku	64.086.000	APBD	-	1 Buku	5.306.612
2	1	4	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I Dan Semester II	Dinas Tenaga Kerja	2 Buku	1.178.000	APBD	-	2 Buku	1.398.839
2	1	4	3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun	Dinas Tenaga Kerja	1 Buku	773.000	APBD	-	1 Buku	922.789
2	1	5		<b>Preogram Perluasan Dan Penempatan Kerja</b>	<b>Persentase Cakupan Peningkatan Jumlah Kesempatan Kerja</b>	<b>Stadion Kanjuruhan Dan SMK-SMK Di Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Jabung Dan Pagelaran, Salah Satu Hotel Di Kabupaten Malang</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>	-	<b>100%</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	1	5	1	Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Karya Yang Dapat Mengentas Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran Dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Terciptanya Lapangan Kerja Baru Bersifat Sementara Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar	Kecamatan Singosari, Jabung Dan Pagelaran	264 Orang		DBHCHT	-	264 Orang	
2	1	5	2	Pengendalian Dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Salah Satu Hotel Di Kabupaten Malang	100%		APBD	-	100%	
2	1	6		<b>Program Perluasan Dan Penempatan Kerja</b>	<b>Persentase Cakupan Peningkatan Jumlah Kesempatan Kerja</b>	<b>Stadion Kanjuruhan Dan Smk-Smk Di Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Jabung Dan Pagelaran, Salah Satu Hotel Di Kabupaten Malang</b>	100%		APBD	-	100%	
2	1	6	1	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terlaksananya Kegiatan Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja Bagi Masyarakat							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	1	7		<b>Program Pengembangan Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja</b>	<b>Persentase Cakupan Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Kecamatan Singosari, Lawang, Kapanjen, Wagir, Salahsatu Hotel Di Kabupaten Malang</b>	100%		APBD	-	100%	
2	1	7	1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terwujudnya Draft Besaran UMK	Kecamatan Singosari, Lawang, Kapanjen, Wagir, Salahsatu Hotel Di Kabupaten Malang	1 Draft	862.139.000	APBD	-	1 Draft	887.024.800
2	1	8	1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terlaksanannya Bimtek Negosiasi Yang Efektif Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kecamatan Singosari, Lawang, Kapanjen, Wagir, Salahsatu Hotel Di Kabupaten Malang	100%	288.765.000	APBD	-	100%	249.979.000
2	1	9		<b>Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Cakupan Pemenuhan Lapangan Kerja Baru/Pelatihan Kewirausahaan, Meningkatnya</b>	<b>Blki Singosari, Kecamatan Pujon, Kecamatan</b>	100%		APBD	-	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>Keterampilan Dan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Sumbermanjingwetan</b>							
2	1 9 2	Penguatan Sarana Dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau	Terlaksananya Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	BLKI Singosari, Kecamatan Pujon & Sumbermanjing Wetan	40 Lembaga	99.119.000	APBD	-	40 Lembaga	101.096.000
2	1 9 3	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	BLKI Singosari, Kecamatan Pujon & Sumbermanjing Wetan	240 Orang	653.042.000	APBD	-	240 Orang	633.498.000
<b>2</b>	<b>1 10</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)							
2	1 10 1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Dinas Tenaga Kerja	1 Unit	23.000.000	APBD	-		
2	1 11	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>								
2	1 11 1	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Kabupaten Malang	500 Orang	365.928.500	DBHCHT	-		308.208.000
2	1 11 2	Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat (DBHCT)	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	Kabupaten Malang	300 Orang	1.019.071.500	DBHCHT	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	1	11	3	Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Karya Yang Dapat Mengentaskan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran Dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (DBHCHT)	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	Kabupaten Malang	264 Orang	1.015.000.000	DBHCHT	-	264 Orang	1.070.000.000
3				<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>								
3	6			<b>Transmigrasi</b>								
3	6	1		<b>Program Pengembangan Wilayah Dan Transmigrasi Lokal</b>	<b>Persentase Cakupan Penempatan Transmigran Di Wilayah Transmigrasi</b>	<b>Pemda Sulawesi, Sumatera, Dan Kalimantan</b>	100%					
3	6	1	1	Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Koordinasi Dg Pemda Sulawesi, Sumatera, Dan Kalimantan	Pemda Sulawesi, Sumatera, Dan Kalimantan	3 Lokasi	141.164.000	APBD	-	3 Lokasi	142.716.000
3	6	1	2	Pengerahan Dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Terlaksananya Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Pemda Sulawesi, Sumatera, Dan Kalimantan	15 KK	171.735.000	APBD	-	15 KK	196.282.000
3	6	1	3	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Kecamatan Pujon, Kecamatan Sumbermanji ngwetan	560 Orang	122.600.000	APBD	-	560 Orang	137.674.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	6	1	4	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Terlaksananya Kegiatan Transmigrasi Lokal	Kecamatan Pujon, Kecamatan Sumbermanji ngwetan	15 Orang	204.527.000	APBD	-	15 Orang	110.159.000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>								6.645.348.000				6.862.048.893

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018**

**Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 9 program dan 29 kegiatan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja memiliki Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Transmigrasi, berikut program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Perluasan dan Penempatan kerja;
6. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
9. Program Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi Lokal.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2018 sampai dengan triwulan II tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Formulir Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah**  
**Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang**  
**Periode Pelaksanaan 2018 sampai dengan triwulan II**

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Ket.
				5		6		7		8		9		10		11		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2.201.15.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100%	5.471.004.546	100%	1.044.010.800	100%	1.301.766.000	32.85 %	427.572.500,00	33	33	32.85 %	1.471.583.300,00	33	27	
	2.201.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	37500 buah	1.079.417.740	6682 buah	166.206.200	7500 buah	13.170.000	4083 buah	5.540.000,00	54	42	10765 buah	171.746.200,00	28,7	16	-
	2.201.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	125.103.963	12 Bulan	21.091.200	12 Bulan	24.000.000	6 Bulan	10.000.000,00	50	42	18 Bulan	31.091.200,00	30	25	-
	2.201.15.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 orang	1.054.525.328	12 orang	180.870.000	11 orang	538.148.000	6 orang	248.721.000,00	55	46	18 orang	429.591.000,00	30	41	-
	2.201.15.01.04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan	245 Unit	101.766.125	49 Unit	102.200.000	49 Unit	19.900.000	7 Unit	4.450.000,00	14	22	56 Unit	106.650.000,00	22,9	105	-

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			(Unit)																
	2.201.15.0 1.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 jenis	264.726.961	36 jenis	41.570.200	36 jenis	71.620.000	8 jenis	14.957.500,00	22	21	44 jenis	56.527.700,00	73,3	21	-	
	2.201.15.0 1.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	75 Jenis	363.605.287	15 Jenis	46.635.700	15 Jenis	146.498.000	2 Jenis	17.700.000,00	13	12	17 Jenis	64.335.700,00	22,7	18		
	2.201.15.0 1.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	367 jenis	18.767.758	68 jenis	2.920.000	68 jenis	5.100.000	28 jenis	2.150.000,00	41	42	96 jenis	5.070.000,00	26,2	27		
	2.201.15.0 1.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	45 Unit	525.317.966	9 Unit	102.200.000	9 Unit	31.500.000	0 Unit	0	0	0	9 Unit	102.200.000,00	20	19	-	
	2.201.15.0 1.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis)	60 Jenis	564.734.058	36 Jenis	119.800.000	36 Jenis	96.000.000	12 Jenis	31.400.000,00	33	33	48 Jenis	151.200.000,00	80	27	-	
	2.201.15.0 1.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	60 HOK	706.358.793	96 HOK	148.942.500	94 HOK	220.975.000	17 HOK	67.289.000,00	18	30	113 HOK	216.231.500,00	188	31	-	
	2.201.15.0 1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	60 HOK	666.680.567	394 HOK	111.575.000	394 HOK	134.855.000	106 HOK	25.365.000,00	27	19	500 HOK	136.940.000,00	833	21	-	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	2.201.15.0 2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	100%	302.467.782	100%	43.648.000	100%	115.546.000	4,08 %	13.138.000,00	4,1	11	4,08 %	56.786.000,00	4,1	19	
	2.201.15.0 2.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	23.000.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	-
	2.201.15.0 2.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	197.851.103	1 Jenis	26.608.000	1 Jenis	73.306.000	2 Jenis	6.751.000,00	200	9,2	2 Jenis	33.359.000,00	200	17	-
	2.201.15.0 2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	104.616.679	8 Unit	17.040.000	8 Unit	19.240.000	2 Unit	6.387.000,00	25	33	2 Unit	23.427.000,00	25	22	-
3	2.201.15. 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	100%	18.042.217	100%	3.000.000	100%	4.000.000	0%	0	0	0	0%	3.000.000,00	0	17	
	2.201.15.0 3.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	3 Orang	18.042.217	3 Orang	3.000.000	3 Orang	4.000.000	0 Orang	0	0	0	0 Orang	3.000.000,00	0	17	-
4	2.201.15. 04	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100%	97.223.830	100%	6.572.800	100%	66.037.000	1,34 %	883.000,00	1,3	1,3	1,34 %	7.455.800,00	1,3	7,7	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.201.15.0 4.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ- IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 Buku	85.781.226	1 Buku	4.545.000	1 Buku	64.086.000	1 Buku	883.000,00	100	1,4	2 Buku	5.428.000,00	40	6,3	-
	2.201.15.0 4.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	6.896.928	2 Buku	1.221.800	2 Buku	1.178.000	0 Buku	0	0	0	2 Buku	1.221.800,00	20	18	-
	2.201.15.0 4.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	4.545.676	1 Buku	806.000	1 Buku	773.000	0 Buku	0	0	0	1 Buku	806.000,00	20	18	
5	2.201.15.0 5	<b>PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN KERJA</b>	<b>Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)</b>	100%	1.313.982.300	100%	204.612.800	100%	214.908.000	36.19 %	77.784.000,00	36	36	36.19 %	282.396.800,0 0	36	21	
	2.201.15.0 5.01	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	100%	1.313.982.300	100%	204.612.800	100%	214.908.000	36.19 %	77.784.000,00	36	36	36.19 %	282.396.800,00	36,2	21	-
6	2.201.15. 06	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA</b>	<b>Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembang an Lembaga Ketenagakerja</b>	100%	4.213.597.200	100%	1.001.879.950	100%	1.150.904.000	28.63 %	329.428.300,00	29	29	28.63 %	1.331.308.250, 00	29	32	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			an (%)																
	2.201.15.0 6.01	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	5 Rekom	4.213.597.200	1 Rekom	713.143.450	1 draft	862.139.000	0 Rekom	205.128.800,00	0	24	1 Rekom	918.272.250,00	20	22	Anggaran di pergunakan melaksanak an kegiatan pendukung untuk pembuatan draft UMK	
	2.201.15.0 6.02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase terlaksananya a Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	0%	0	100%	288.736.500	100%	288.765.000	43.05 %	124.299.500,00	43	43	43.05 %	413.036.000,00	0	0	-	
7	2.201.15. 07	<b>PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</b>	0%	0	100%	500.084.000	100%	752.161.000	50.32 %	378.470.000,00	50	50	50.32 %	878.554.000,0 0	0	0		
	2.201.15.0 7.01	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	0 Orang	0	240 Orang	500.084.000	240 Orang	653.042.000	250 Orang	378.470.000,00	86	58	250 Orang	878.554.000,00	0	0	-	
	2.201.15.0 7.02	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	0 Orang	0	0 Orang	0	40 Orang	99.119.000	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	-	
8	2.201.15. 08	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	100%	3.255.221.000	100%	0	100%	2.400.000.000	0%	0	0	0	0%	0	0	0		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.201.15.0 8.01	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentas Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	264 Orang	1.00.000.000	0 Orang	0	264 Orang	1.015.000.000	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	0	
	2.201.15.0 8.02	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	500 Orang	1.255.149.500	0 Orang	0	500 Orang	365.928.500	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	0	
	2.201.15.0 8.03	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	300 Orang	1.000.071.500	0 Orang	0	300 Orang	1.019.071.500	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	0	
9	3.306.15. 01	<b>Program Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi Lokal</b>	<b>Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi</b>	100%	2.939.098.500	100%	473.860.800	100%	640.026.000	15.79 %	101.070.900	16	16	15.79 %	574.931.700,0 0	16	20	
	3.306.15.0 1.01	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku & antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimatan	3 Lokasi	724.636.500	3 Lokasi	124.654.000	3 Lokasi	141.164.000	2 Lokasi	77.125.900	67	55	2 Lokasi	201.779.900,00	66,7	28	-

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	3.306.15.0 1.02	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	5 KK	974.210.000	3 KK	150.488.800	15 KK	171.735.000	0 KK	0	0	0	0 KK	150.488.800,00	0	15	Anggaran dipergunak an untuk monitoring transmigra n di wilayah Tanjung Selor Kalimatan Utara
	3.306.15.0 1.03	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	560 Orang	685.358.000	560 Orang	120.250.000	560 Orang	122.600.000	120 Orang	23.945.000	25	20	120 Orang	144.195.000,00	21,4	21	Anggaran pada triwulan II dipergunak an melaksanak an kegiatan pendukung dalam penyuluhan transmigasi lokal
	3.306.15.0 1.04	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	15 Orang	554.894.000	30 Orang	78.468.000	15 Orang	204.527.000	0 Orang	0	0	0	0 Orang	78.468.000,00	0	14	Anggaran digunakan untuk koordinasi awal
				<b>17.610.637.375</b>		<b>3.277.669.150</b>		<b>6.645.348.000</b>		<b>1.328.346.700</b>		<b>20</b>		<b>4.606.015.850</b>		<b>26</b>		

**Keterangan Tabel 2.1****1. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja**

Tingkat capaian kinerja kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum bisa diukur karena draf rekom UMK dibuat pada akhir tahun atau triwulan IV

**2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial**

Semua kegiatan pada program pembinaan lingkungan sosial tidak bisa dilaksanakan sampai dengan triwulan II karena menyesuaikan nomenklatur terbaru sesuai PMK.

**3. Program Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi Lokal**

Tingkat capaian kinerja pada trwiulan II masih 15,79% hal ini dikarenakan rencana pelaksanaan keberhasilan pada triwulan III dan IV. Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Lokal belum dilaksanakan sebelum jadwal keberangkatan transmigran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

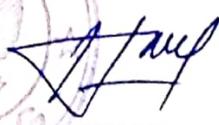
Perubahan Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada Tahun 2018 terdapat program/kegiatan sebanyak 9 (sembilan) program dan 29 (dua puluh Sembilan) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018 ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

  
  
**SANUSI**

**BERITA ACARA**  
HASIL VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018  
Nomor : 050/7660/35.07.105/2018

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2018 Kabupaten Malang tahun dua ribu delapan belas yang dihadiri tim penyusun Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

**MENYEPAKATI,**

- Kesatu : Sistematisa Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Kedua : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.
- Ketiga : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif termasuk lokasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.
- Keempat : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan Perubahan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;



**Drs. Yoyok Wardoyo, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640926 201503 1 001



**Is. Tomie Herawanto, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661126 199303 1 004